

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang bersangkutan (*endogenous development*), pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah sehingga dapat meningkatkan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan UU Nomor 1999 menjelaskan tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah dan UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembangunan daerah dapat ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi yaitu pemerintah daerah dengan memberikan kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom agar dapat mengendalikan dan mengurus pemerintah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat telah membagi beberapa sumber pembiayaan kepada daerah untuk melakukan tugas serta kewajiban yang telah sehingga

setiap pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari peluang untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan kas daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pasal 1 angka 18 “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber penerimaan yang dihasilkan dari dalam daerah tersebut, oleh karena itu diharapkan mampu menjadi penopang utama dalam membiayai kegiatan pemerintah disuatu daerah. Undang-undang yang telah disampaikan pemerintah, jelas menyatakan bahwa kewajiban tentang membayar pajak. Sebagaimana yang telah disampaikan Al-Qur’an pada surat Al Baqarah ayat 188, yang menjelaskan tentang kelebihan harta sebaiknya dikeluarkan untuk kemaslahatan umat. Seperti yang disampaikan ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Ayat Al-Baqarah diatas, memang tidak menjelaskan tentang kewajiban membayar pajak. Namun, dijelaskan bahwa terdapat larangan memakan harta seutuhnya ada baiknya jika kita mengeluarkan. dalam ekonomi disebut sebagai pajak sedangkan dalam islam menyarankan bahwa kita sebaiknya menyerahkan sebagian harta untuk dibagikan kepada seseorang yang lebih membutuhkan, contohnya seperti anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhu'afa. Ketika mengeluarkan harta tersebut, maka harus dibagikan secara rata atau adil.

Keadilan merupakan sesuatu hal yang penting dalam ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari. Keadilan tidak hanya membagi sama rata, tetapi bagaimana cara memperlakukan seorang. Sebagai umat muslim kita harus saling menjaga amanat yang telah diberikan Allah SWT melalui perantara manusia. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa:58).

Setiap pemerintah daerah di Indonesia diberikan hak dan juga wewenang untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri dengan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah untuk

mencerminkan kemandirian daerah, dengan ini apabila pendapatan daerah semakin meningkat, maka daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan PAD dapat dipergunakan oleh daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan sehingga dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu tujuan yang lebih penting dari peningkatan Pendapatan asli daerah adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (I Ketut Djayasastra 2014). Selain itu juga dengan adanya peranan dari pemerintah daerah dapat menentukan bagaimana strategi pendapatan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan ekonomi pada setiap daerahnya melalui sarana dan psarana yang dibutuhkan pada setiap daerah akan berpengaruh pada sumber keuangan yang masuk.

Pemerintah daerah dituntut supaya lebih mandiri dalam mengelola sumber hasil penerimaan dengan tujuan untuk membiayai pembangunan daerah, melakukan tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, agar pemerintah daerah memperoleh hasil yang optimal dari kekayaan yang dimiliki daerahnya. Setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah itu

sendiri dengan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo,2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan salah satu indikator kemandirian suatu daerah, semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat begitu juga sebaliknya apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari setiap daerah untuk memperoleh Pendapatan yang tinggi, perolehan hasil pendapatan yang masuk akan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan demikian dapat menurunkan kesenjangan sosial.

Salah satu pendapatan pemerintah daerah merupakan dari sektor pariwisata, pariwisata adalah salah satu potensi khusus yang akan menjadi ciri khas pada suatu wilayah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah, yang juga dijadikan jalur perlintasan kendaraan Antara Jawa Barat dan Jawa Timur bagian selatan. Sudah tidak asing lagi, jika D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terkenal sebagai kota pelajar juga dikenal sebagai kota budaya yang kental serta keramahan lingkungan masyarakat sekitar, begitu juga pariwisatanya yang memiliki banyak potensi wisata mulai dari wisata alam, budaya, juga wisata kuliner. Sehingga dapat menarik para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburannya di Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam sehari, dengan demikian dapat memberikan dampak positif bagi industri sektor pariwisata yang memiliki potensi untuk perkembangan perekonomian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk masing-masing daerah guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah sebagian dari penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk memajukan perubahan daerah. Selain itu Pendapatan asli daerah juga salah satu faktor modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah, tidak hanya itu Pendapatan Asli Daerah juga menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan keuangan daerah kecuali dari hasil pajak dan bukan pajak.

Besarnya PAD suatu daerah dapat dilihat dari derajat indikasi kemandirian daerah. Dengan disahkan dan diberlakukannya tentang Otonomi Daerah, Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia mempunyai kewenangan yang lebih luas lagi. Seperti yang tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pasal 4 yang sebagaimana disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah, yang ditandai besarnya penerimaan keuangan daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama enam tahun terakhir:

Tabel 1. 1.
Perkembangan PAD per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2013	959.915.128	224.197.857	83.427.448	455.998.564	383.052.140
2014	158.623.927	357.411.064	159.304.338	576.337.600	470.634.760
2015	170.822.327	390.624.492	196.099.244	643.130.080	510.548.830
2016	180.273.364	404.454.704	206.278.865	717.151.176	540.504.300
2017	249.692.648	494.179.068	271.370.044	825.637.751	657.049.370
2018	203.857.992	462.653.966	227.299.980	894.272.961	667.493.800

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta ini terjadi penurunan dan peningkatan pendapatan yang berbeda-beda pada tahun 2018. Dimana Pendapatan asli daerah terendah terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 sebesar Rp.203.857.992 juta rupiah dan di Kabupaten Gunung Kidul pada 2018 sebesar Rp.227.299.980 juta rupiah, sedangkan pendapatan tertinggi terjadi di 2 Kabupaten, dan 1 Kota yang diperoleh Kota Yogyakarta sebesar Rp.667.493.800 juta rupiah pada tahun 2018, kemudian Kabupaten Sleman sebesar Rp.894.272.961 juta rupiah pada tahun 2018 dan yang terakhir Kabupaten Bantul sebesar Rp. 462.653.966 juta rupiah pada tahun 2018. Realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi dapat memberikan tanda bahwa pemerintah daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensi daerahnya serta menyaring komponen-komponen apa saja yang masuk dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen tersebut yaitu terdiri

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan yang sah lain-lain.

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang pertama diikuti kenaikan penerimaan dari hasil pajak daerah, yang kedua dari hasil komponen retribusi daerah, kemudian yang terakhir hasil dari komponen kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian untuk meningkatkan penerimaan daerah sehingga pemerintah perlu melaksanakan kebijakan-kebijakan pada sistem perpajakan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah *bruto* seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat dari berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh residen atau non residen.

Indikator lain bagi suatu daerah untuk melihat keberhasilan otonomi daerah berupa pembangunan daerah yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan keputusan dimasa yang akan mendatang yaitu dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan meningkatnya PDRB dapat menambah penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan serta akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan produktifitas. Berikut dibawah ini adalah tabel mengenai pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama enam tahun terakhir:

Tabel 1. 2.
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 per Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Tahun 2013 – 2018 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2013	2.045.902	4.639.945	3.823.432	7.509.793	6.494.890
2014	2.139.380	4.873.696	3.997.209	7.908.142	6.840.948
2015	2.238.439	5.115.730	4.189.691	8.318.159	7.189.372
2016	2.344.866	5.373.999	4.393.984	8.751.971	7.556.426
2017	2.484.806	5.647.813	4.613.906	9.218.890	7.952.009
2018	2.754.346	5.956.627	4.851.830	9.810.560	8.388.716

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY 2018

Dari Tabel 1.2 diatas merupakan perkembangan PDRB harga konstan 2000 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Perkembangan PDRB terbesar di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar 9.810.560 juta rupiah, pada tahun 2018 perkembangan PDRB Kota Yogyakarta sebesar 8.388.716 juta rupiah, Kabupaten Bantul sebesar 5.956.627 juta rupiah pada tahun 2018, kemudian Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sebesar 4.851.830 juta rupiah dan perkembangan PDRB terkecil di Kabupaten Kulonprogo sebesar 2.754.346 juta rupiah pada tahun 2018. Peningkatan PDRB pada setiap tahunnya tersebut dapat menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kemajuan di bidang perekonomian.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang meningkat akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah, karena semakin pendapatan masyarakatnya tinggi maka semakin memudahkan masyarakat untuk membayar berbagai jenis pungutan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga dengan bertambahnya penerimaan pemerintah dapat membiayai

pembangunan daerah yang ada di Kota Yogyakarta dengan harapan dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap produktivitas masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang mencerminkan tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian yaitu dengan cara menentukan besar kecilnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya. Bentuk pengeluaran pemerintah itu sendiri berupa alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah sebagai kerangka untuk menstabilkan tingkat harga, maupun tingkat output dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai instrumen utama bagi kebijakan pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar kecil pendapatan dan pengeluaran, dalam membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Sedangkan seluruh belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah sebagai kepentingan administrasi pembangunan infrastuktur yang berguna untuk pembangunan daerah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, sehingga dengan adanya kegiatan ekonomi yang meningkat akan menambah masuknya sumber aliran penerimaan pemerintah daerah. Dibawah ini merupakan tabel pengeluaran pemerintah

yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per Kabupaten/Kota dalam enam tahun terakhir:

Tabel 1. 3.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah per Kabupaten/Kota di D.I
Yogyakarta Tahun 2013– 2018 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2013	935369836	1355174641	1236639665	1733223826	1134964780
2014	1060577348	1700051279	1267067508	1896477377	1336633015
2015	1243069953	1933302495	1586001084	2328751920	1539699344
2016	1388596506	2016543979	1651553579	2455446949	1665420970
2017	1440263093	2076742163	1860225638	2489996631	1484552899
2018	1481008335	2165651760	1772887364	2580093717	1652727843

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran pemerintah dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) tahun berturut-turut meningkat pada setiap tahunnya kecuali Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul peningkatan jumlah pengeluaran pemerintahnya tidak stabil pada setiap tahun. Jumlah realisasi pengeluaran pemerintah di Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2016 meningkat sebesar Rp.113.496.478 juta rupiah pada tahun 2013, Rp.133.663.301 juta rupiah pada tahun 2014 Rp.153.969.934 juta rupiah pada tahun 2015, Rp.166.542.097 juta rupiah pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 realisasi pengeluaran pemerintah di Kota Yogyakarta menurun sebesar Rp.148.455.289 juta rupiah, pada tahun berikutnya realisasi pengeluaran pemerintah Kota Yogyakarta meningkat kembali sebesar Rp.165.272.784 juta rupiah pada tahun 2018. Selanjutnya di Kabupaten Gunungkidul jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2013-2017 meningkat berturut-turut, akan tetapi pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah di Kabupaten

Gunungkidul menurun sebesar Rp.177.288.736 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman sebesar Rp.258.800.937 juta rupiah pada tahun 2018, kemudian pengeluaran pemerintah tertinggi juga terjadi di Kabupaten Bantul sebesar Rp.216.565.176 pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 207.674.216 juta rupiah. Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah pengeluaran pemerintah terendah terjadi di Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp.148.100.833 juta rupiah pada tahun 2018, pada tahun sebelumnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten Kulonprogo hanya Rp.144.026.309 juta rupiah pada tahun 2017-2013.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang banyak dikenal sebagai kota pelajar juga dikenal sebagai kota budaya dan kota pariwisata yang memiliki banyak potensi wisata yang melimpah sehingga dapat dikembangkan menjadi pemasukan sumber pendapatan daerah. Maka dengan dikembangkannya potensi pariwisata yang ada di Kota DIY akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut dapat terwujud.

Salah satu indikator dalam industri pariwisata khusus pada sektor pariwisata yaitu banyaknya jumlah hotel, jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan. Dari kedua indikator tersebut dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata pada suatu daerah dapat menjadikan industri pariwisata yang lebih maju, jika industri

tersebut diimbangi dengan meningkatkan sarana dan prasana bagi para wisatawan lokal maupun domestik. Seperti fasilitas tempat penginapan, jasa pelayanan transportasi, tempat makan (restoran) dan lain-lain. Berikut adalah tabel jumlah obyek wisata yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per Kabupaten/Kota dalam enam tahun terakhir:

Tabel 1. 4.
Jumlah Objek Wisata per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018 (Unit)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2013	18	8	18	26	23
2014	18	8	18	28	25
2015	18	17	18	32	25
2016	16	17	12	55	26
2017	16	53	11	46	23
2018	41	47	14	61	23

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY 2018

Berdasarkan dari pada Tabel 1.4 diatas bahwa dalam enam tahun terakhir jumlah objek wisata dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi kecuali Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Kulon progo jumlah objek wisata dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 16 unit objek wisata pada tahun 2018 jumlah objek wisata meningkat sebanyak 41 unit objek wisata. Di Kabupaten Bantul jumlah objek wisata juga sama halnya dengan Kabupaten Kulon progo mengalami fluktuasi dari tahun 2013 jumlah objek wisatanya sebanyak 8 unit objek wisata, pada tahun 2014 jumlah objek wisata di Kabupaten Bantul sebanyak 8 unit objek wisata, kemudian di tahun 2015-2016 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan jumlah objek wisata sebanyak 17 unit objek wisata, pada tahun 2017 jumlah objek wisata di Kabupaten Bantul mengalami

peningkatan sebanyak 53 unit objek wisata, kemudian pada tahun 2018 jumlah objek wisata di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 47 unit objek wisata. Pada tahun 2013-2015 jumlah objek wisata di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 18 unit tempat objek wisata, seiring dengan berjalannya waktu jumlah objek wisata di Kabupaten Gunungkidul jumlahnya menurun sebanyak 12 unit objek wisata pada tahun 2016 dan 11 unit objek wisata pada tahun 2017 kemudian pada tahun berikutnya jumlah objek wisata di Kabupaten Gunungkidul meningkat sebanyak 14 unit objek wisata pada tahun 2018. Selanjutnya di Kabupaten Sleman di tahun 2013 jumlah objek wisata sebanyak 26 unit objek wisata, kemudian di tahun 2015-2016 jumlah objek wisata di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebanyak 28 unit objek wisata pada tahun 2015, 32 unit objek wisata pada tahun 2016 dan 55 unit objek wisata pada tahun 2016 dan 46 unit objek wisata pada tahun 2017 jumlah objek wisata menurun, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 jumlah objek wisata di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kembali sebanyak 61 unit objek wisata lebih meningkat dari pada di tahun sebelumnya. Di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 - 2015 jumlah objek wisata sebanyak 25 unit objek wisata, pada tahun 2016 jumlah objek wisata di Kota Yogyakarta meningkat sebanyak 26 unit objek wisata kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2018 jumlah objek wisata menurun sebanyak 23 unit jumlah objek wisata . Dengan banyaknya jumlah objek yang ada di Provinsi DIY diharapkan dapat memberikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata di Daerah Istimewa

Yogyakarta juga dapat mengoptimalkan lagi potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan.

Sebagai sumber penerimaan pendapatan, pariwisata juga tidak lepas dari jumlah wisatawan yang berpengaruh dalam penerimaan sektor pariwisata. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri untuk mengikat daya tarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena banyaknya tempat objek wisata yang menjadi sasaran utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut diantaranya yaitu kawasan wisata malioboro, monjali (monumen jogja kembali), pasar beringharjo, de mata jogja, taman sari, monumen sonobudoyo, monumen benteng vredebrug, kraton jogja, dll.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata secara otomatis dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan daerah sektor pariwisata yang bersumber dari retribusi tempat rekreasi, retribusi parkir, atau dengan mendatangkan wisatawan mancanegara yang berkunjung juga dapat menambah perolehan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut maka akan berdampak pada peningkatan Pendapatan asli daerah dan dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi. Selain itu, dilihat dari segi ekonominya sektor pariwisata dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat yang saling berkaitan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar menjadi

membalik. Berikut adalah tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan per Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode enam tahun terakhir :

Tabel 1. 5.
Jumlah Kunjungan Wisatawan per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018 (Juta Jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2013	631.759	2.037.674	1.555.222	3.359.077	4.300.284
2014	673.153	2.305.988	1.955.817	4.091.445	4.916.984
2015	1.289.695	4.519.199	2.642.759	4.950.934	5.619.731
2016	1.353.400	5.148.633	3.479.894	5.720.468	5.520.952
2017	1.400.786	9.141.150	3.246.996	6.814.558	5.347.303
2018	1.969.623	8.840.442	3.055.284	7.898.808	4.752.351

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY 2018

Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DIY baik itu wisatawan domestik maupun manca negara dalam enam tahun terakhir dari 5 Kabupaten/Kota masing-masing pada setiap tahun mengalami peningkatan dan mengalami penurunan. di Kabupaten Gunungkidul terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 3.055.284 jiwa pada tahun 2018. Kemudian di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2015 sebanyak 1.289.695 jiwa terus meningkat hingga pada tahun 2018 menjadi 1.969.623 jiwa. Pada Kota Yogyakarta kenaikan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 5.619.731 jiwa kemudian pada tahun 2016-2018 jumlah kunjungan wisatawan pada Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya selalu berkurang. Selanjutnya jumlah wisatawan terbanyak di Kabupaten Bantul sebesar 8.840.442 jiwa di tahun 2018, namun jumlah kunjungan wisatawan di

Kabupaten Bantul tersebut mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 300.708 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2017 sebesar 9.141.150 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah wisatawan pada setiap tahunnya diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan sektor pariwisata di Provinsi DIY. Sehingga juga dapat meningkatkan kemandirian daya saing melalui sektor pariwisata dengan harapan mampu memberikan kontribusi yang cukup baik juga untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widodo, dkk (2016) tentang analisis pengaruh PDRB, PMDN, dan PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017 di wilayah Bali. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 85% variabel pdrb, pmdn, pma berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Bali, variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap PAD adalah variabel PDRB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavina 2012 tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah. Alat analisis yang di gunakan adalah regresi *Error Correction Model* (ECM), dengan variabel independen pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PDRB. Hasil penelitian dari uji F menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh terhadap PAD, sedangkan hasil dari uji T menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah secara individual berpengaruh signifikan

terhadap PAD, akan tetapi variabel pdrb dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bagus 2013 tentang analisis pengaruh PMDN, PMA dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, dengan menggunakan alat analisis regresi berganda model double log, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati, variabel penanaman modal asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budhiasa 2014 tentang pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, jumlah hotel, dan akomodasi lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu *path analysis*, hasil analisis menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah hotel dan akomodasi lainnya berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nusa 2019 tentang analisis determinan Pendapatan Asli Daerah sub sektor pariwisata di Provinsi DIY periode 2012-2017. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan,

dan jumlah hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan jumlah biro perjalanan wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata di Provinsi DIY.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Suastika 2017 tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan Path Analysis, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan lama tinggal wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat ketidak konsistenan hasil pada beberapa variabel penelitian. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali dan tertarik untuk meneliti judul “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Objek Wisata, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY periode 2007-2018”.

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan berdampak pada daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Besarnya pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga secara otomatis akan mendorong perekonomian daerah. Selain itu juga Pendapatan asli daerah bersumber dari berbagai sektor, yaitu dari sektor pariwisata. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena

banyaknya tempat objek wisata dan tempat wisata baru maka penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan variabel pdrb, pengeluaran pemerintah, jumlah objek, jumlah kunjungan wisatawan, dan pendapatan asli daerah.

Pendapatan yang masuk dalam daerah secara otomatis akan berpengaruh terhadap kemandirian dan kemajuan daerah serta dapat meningkatkan keadaan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan efektif terhadap sektor-sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sektor pajak untuk Provinsi DIY yang memiliki kontribusi yang sangat efektif dalam pendapatan daerah akan dikembalikan kembali ke publik berupa pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

Memilih lokasi penelitian di Provinsi DIY yaitu karena banyak potensi sumber daya yang melimpah, seperti sumber daya alam yang dijadikan sebagai tempat-tempat wisata, serta sumber daya pembangunan dijadikan sebagai bangunan penginapan wisatawan. Saat ini sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berkembang pesat, sebagai contoh banyaknya tempat wisata yang baru dibuka di daerah Yogyakarta. Dengan keadaan yang seperti ini ada banyak kemungkinan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat berasal dari sektor kepariwisataan.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan dinas terkait untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor agar lebih efektif dan efisien serta berperan dalam menjaga kualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik yang nantinya dapat menarik para wisatawan untuk datang berlibur ke D.I.Yogyakarta. Berdasarkan urian latar belakang di atas, maka topik dalam penelitian ini adalah

“ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH OBJEK WISATA, DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2018”

B. Batasan Masalah

Pembatasan secara spesifik juga membuat pembahasan didalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Sehingga dalam penelitian ini saya hanya menganalisis pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Objek Wisata, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan asli daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah objek wisata terhadap Pendapatan asli daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan asli daerah di Provinsi DIY tahun 2007-2018.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan sekiranya dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara praktik, yaitu dapat memberikan informasi terhadap pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota dalam pengambilan keputusan terutama mengenai Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana motivasi agar dijadikan sebagai masukan positif bagi pihak-pihak yang bersangkutan agar lebih menggali, mengembangkan, dan mengawasi sumber daya pada sektor pariwisata. Agar lebih dapat dikelola secara efektif dan efisien.
2. Manfaat secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama Pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sejahtera serta menjadikan suatu daerah menjadi lebih mandiri dan maju apabila sumber penerimaan Pendapatan asli daerah dikelola dengan baik.